

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

David H Baley, *Akibat Korupsi Pada Bangsa-bangsa sedang Berkembang* dalam Mochtar Lubis, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3EES, Jakarta, 1985

Djoko Prakoso, *Peranan Pengawasan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Persada Indonesia, 1990.

Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2010

Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, CV Lubuk Agung, Bandung, 2011

Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014

Jimly Asshiddique, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara*, FH UI, Jakarta, 2004

Juhaya S Praja dan Syahrul Anwar, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, 2014

Juniver Girsang, *Abuse of Power*, JG Publishing, Jakarta, 2012

Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press,  
Yogyakarta, 2011

Moeljatno, *Perbuatan Pidana, Pertanggungjawaban Pidana*, Bina  
Aksara, Jakarta, 1983

Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan*, Elsam, Jakarta, 2004

Pius Prasetyo dkk, *Korupsi dan Integritas dalam Ragam Perspektif*,  
PSIA, Jakarta, 2013

Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan  
KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi  
dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

#### B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 45 ayat (7) dan (10) UU 24/2003

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman

SEMA Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil  
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai  
Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20  
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

C. Kelompok Makalah, Artikel, Jurnal dan Website

[http://www.Kpk.go.id/modules/editor/doi/Strategie\\_plan\\_2008\\_to\\_20](http://www.Kpk.go.id/modules/editor/doi/Strategie_plan_2008_to_20)

11id.pdf,Rencana Strategiik Komisi pemberantasan korupsi,  
2008-2011,diakses tgl 25-03-15. Pkl 03.00

<http://reformasikuhp.org.eksistensi-hukum-pidana-diluar-kuhp-dalam-revisi-kuhp>, dikutip pada tanggal 16 Mei 2020

Yulius Koling Lamanau, "*Pengaruh Pengembalian Kerugian Negara Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2008.

Endri, "*Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Uang Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010.

Mafrukhin, "*Studi Atas Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2004.